

TAJUK RENCANA

Penerbangan Umrah di Masa Pandemi

PEMERINTAH Arab Saudi akhirnya membuka kembali penerbangan umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebanyak 253 jemaah Indonesia kemarin sudah diberangkatkan ke Tanah Suci menggunakan maskapai Saudi Arabia dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (KR 2/11). Ini tentu berita menggembirakan setelah sekian lama calon jemaah umrah asal Indonesia antre untuk bisa diterbangkan ke Tanah Suci. Seperti diketahui, sejak Februari pemerintah Saudi Arabia menghentikan penerbangan umrah dari Indonesia karena pandemi Covid-19.

Jadi, boleh disebut ini merupakan penerbangan perdana jemaah umrah dari Indonesia di masa pandemi Covid-19. Meski masih dalam tahap uji coba, namun pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap seluruh jemaah di semua negara, tidak hanya keharusan melakukan swab terhadap calon jemaah, tapi juga ada pembatasan umur, yakni 18-50 tahun. Selain itu, juga dipastikan calon jemaah dalam kondisi sehat dan tidak ada penyakit penyerta (komorbid), seperti darah tinggi, diabetes, jantung koroner dan sebagainya.

Kita mendukung langkah tegas dari Pemerintah Arab Saudi, bukan saja demi keselamatan calon jemaah, tapi juga keselamatan orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Dengan begitu, tak ada kekhawatiran munculnya klaster baru jemaah umrah. Kita yakin, Pemerintah Arab Saudi juga telah mengatur protokol kesehatan saat jemaah menjalankan prosesi peribadatan. Dengan pembatasan jumlah jemaah untuk masing-masing negara, diharapkan tak terlihat lagi pemandangan calon jemaah berdesak-de-

sakan dalam melakukan ibadah. Pemerintah Arab Saudi pasti akan menerapkan standar protokol kesehatan yang bersifat universal, seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan dan sebagainya.

Masa uji coba yang dijalankan November hingga Desember nanti diharapkan sukses Sehingga bisa menjadi bahan untuk menyusup protap bagi yang akan ikut umrah dari Indonesia. Meski begitu kita juga perlu memberi catatan penting terkait penerbangan umrah dari Indonesia saat ini, yakni kenaikan tarif, baik itu terkait pajak maupun biaya yang diperlukan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kenaikan biaya tersebut memang tak bisa dihindari seiring lonjakan tarif pajak, peningkatan harga BBM, serta biaya swab.

Sepanjang kenaikan tarif masih di kisaran 10 persen, mungkin masih bisa dimaklumi, apalagi dalam kondisi pandemi. Namun kita mendorong pemerintah Indonesia untuk terus memantau penyelenggaraan umrah di Arab Saudi, baik menyangkut tempat penginapan, transportasi, catering dan sebagainya. Kalau memang ada kenaikan biaya operasional, semua harus dijelaskan secara transparan kepada calon jemaah, sehingga mereka bisa paham.

Lebih dari itu, aspek keamanan dan kenyamanan selama jemaah menjalankan ibadah di Arab Saudi juga harus mendapat perhatian serius. Kita tentu tak ingin mendengar ada jemaah asal Indonesia yang telantar dan tidak mendapat pelayanan semestinya. Karena itu kita mendorong optimalisasi pelayanan jemaah dari Pemerintah Arab Saudi sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan khushyuk. □

Memaksimalkan Perekrutan PNS Baru

PENGUMUMAN serentak PNS 2019 pada 30 Oktober 2020 menjadi salah satu cerita perjalanan memasuki akhir tahun 2020. Pengumuman menjadi angin segar bagi para pelamar dan pemerintah untuk terus menggerakkan roda pemerintahan. Meskipun pandemi masih terjadi, proses pemerintahan harus tetap berjalan seperti biasa. Maka, keberlanjutan perekrutan PNS mutlak dilakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perekrutan PNS terbaru ini dapat dimaksimalkan dengan kondisi pandemi Covid-19, dimana pelayanan publik lebih sering dilakukan secara *online* ketimbang *offline*?

Sebelum menjawab pertanyaan, kita perlu memahami bahwa jauh sebelum pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan *Flexible Working Arrangement* (FWA). Konsep yang dikenalkan Desember 2019 ini menitikberatkan pada prinsip, perkembangan teknologi di dalam pemerintahan tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis.

Penerapan konsep FWA ini menyebabkan ruang dan waktu pelayanan publik menjadi bias. Sebagai contoh, bisa saja pelayanan pengurusan passport dilakukan tengah malam dan harus direspons saat itu juga karena perbedaan waktu antarnegara. Kebutuhan ini menimbulkan dua permasalahan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pengembangan FWA ini menuntut PNS untuk siaga setiap saat merespons publik. Sementara di sisi lain, salah satu tujuan FWA adalah mengakomodasi kesejahteraan PNS dari sisi waktu. Bagaimana seharusnya perekrutan PNS yang baru ini dapat menjembatani?

Sistem AI

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) di dalam pelayanan publik. Perlu dicatat bahwa penerapan AI tidak dimaksudkan un-

Satria Aji Imawan

tuk mengganti peran PNS di dalam pelayanan publik. AI justru dapat diarahkan sebagai penunjang kinerja PNS agar lebih maksimal. Dengan AI, permintaan pelayanan publik *real time* dan kesejahteraan waktu dapat diakomodasi secara bersamaan. Salah satu praktek AI yang paling sederhana adalah penerapan *Frequently Asked Questions* (FAQs) yang



KR-JOKO SANTOSO

biasanya dapat dilihat di website pemerintah. FAQs menggunakan prinsip AI sederhana dengan melakukan koding jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa memaksimalkan kerja PNS yang lebih bersifat *online* dibanding *offline* bukan sesuatu yang mustahil. Dengan adanya AI, PNS justru dapat hadir selama 24 jam per 7 hari. Namun, tentu saja hal ini harus direspons dengan pembangunan kompetensi dasar seorang PNS.

Salah satu kebutuhan kompetensi yang harus dibangun bagi PNS baru adalah kemampuan digital. Paling tidak, kompetensi berupa respons terhadap pe-

layanan publik melalui aplikasi *chatting real time* mutlak untuk dikuasai. Hal ini tentu menjadi kombinasi sempurna jika pembangunan AI di dalam pelayanan publik dapat sesuai dengan kapasitas PNS yang baru. Dengan demikian, kapasitas PNS baru akan sesuai dengan perkembangan zaman pelayanan publik 4.0.

Kompetensi Digital

Barangkali kedua langkah tersebut dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan pengelolaan PNS yang baru direkrut tahun 2019, yang masih diwarnai kondisi pandemi. Pada masa seperti ini, publik melihat kinerja responsivitas pelayanan justru lebih banyak melalui *online*, seperti *website* dan aplikasi. Sehingga, penerapan AI dan pengembangan kompetensi digital PNS wajib dilakukan.

Jika pembangunan AI dapat mengakomodasi pelayanan publik dengan responsif dan akomodatif, maka pengembangan kemampuan digital mampu menyediakan pelayanan publik yang dinamis dan akuntabel. Tautan-tautan ini setidaknya menjadi landasan untuk memaksimalkan perekrutan PNS baru 2019. Agar apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud,

yaitu Tata Kelola Kepemerintahan 4.0 yang lebih dinamis, responsif, dan akomodatif. □

*) **Satria Aji Imawan MPA**, Asisten Dosen Sekolah Pascasarjana Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Merealisasi Visi Maritim DIY

DI TENGAH pandemi Covid-19 yang terus mengancam kesehatan masyarakat dan ekonomi, sektor pertanian terus meredup dan kelautan masih menunjukkan pertumbuhan positif, di tengah seluruh sektor tumbuh negatif pada kuartal ketiga lalu. Bagi DIY, sektor pertanian masih tumbuh dan berperan strategis untuk penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi.

DIY saat ini juga giat mendorong perekonomian daerah ke arah laut. Target pemanfaatan potensi kemaritiman sejalan dengan visi baru DIY. Visi Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang di-Perda-kan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2022 : Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Visi baru DIY ini tidak terlepas dari visi RPJMD periode lima tahun sebelumnya (2012-2017), yang mengambil strategi budaya, yaitu membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’. Dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal.

Menengok agak kebelakang, di akhir tahun 1970an, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam catatan yang penulis peroleh, telah menegaskan pentingnya mengalihkan pandangan dari menatap Utara (Merapi) ke Selatan (Laut). Arah kebijakan saat ini tentu bermakna strategis untuk maritim DIY ke depan, karena menjadikan laut sebagai halaman depan. Atau terjadi reorientasi dari sepenuhnya bergantung pada sumberdaya di darat, ke arah diversifikasi sumber-sumber penghidupan di laut.

Gerbang Samudra Hindia

Berkaca dari perjalanan perikanan laut DIY, yang baru berumur empat dekade, pelabuhan perikanan menjadi

Suadi

gerbang menuju samudera. Produksi perikanan tangkap DIY sebenarnya meningkat hampir 6 kali lipat sejak 1981, yaitu dengan volume produksi 6.370 ton pada 2019 lalu, dengan penyumbang utama adalah pelabuhan perikanan Sadeng. Data di DIY menunjukkan perubahan kecil pada struktur armada (dari Perahu Motor Tempel ke Kapal Motor 10-30GT) telah membantu peningkatan signifikan produktifitas perikanan. Untuk percepatan pertumbuhan perikanan skala menengah dan besar, keberadaan pelabuhan adalah keharusan. Kawasan pelabuhan perikanan seperti ini tidak hanya penting sebagai pusat bisnis terpadu.

Secara Cepat

Dua gerbang menuju Samudera Hindia sebenarnya telah mulai ada, walaupun baru satu yang fungsional. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Kabupaten Gunungkidul menjadi pintu Timur dan saat ini menjadi andalan DIY menuju samudera. Sementara, Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto Kabupaten Kulonprogo diharapkan menjadi pintu Barat, jika suatu saat beroperasi. Dengan posisi yang strategis, berdampingan dengan area Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Tanjung Adikarto akan menjadi kawasan industri perikanan yang secara cepat bisa terhubung dengan pasar yang luas baik domestik maupun ekspor. Melalui gerbang ini juga terbuka ruang bagi berkembangnya aktivitas ekowisata bahari, pendidikan, dan penelitian kelautan.

Sudah menjadi kodratnya, ekonomi berbasis kemaritiman memiliki dua basis aktivitas, yaitu darat dan laut. Mengutip Suris-Regueiro dkk (2013) dalam Jurnal *Marine Policy*, kemaritiman terbagi menjadi 9 sektor, dengan kurang lebih 34 kelompok industri. DIY dapat memadukan empat sektor di antaranya untuk menjawab visi abad Samudra Hindia : (1) sumberdaya hayati laut untuk produksi pangan laut dan obat; (2) sumberdaya non-hayati untuk produksi garam dan energi terbarukan; (3) kepariwisataan; dan (4) pendidikan/penelitian.

Kawasan ekonomi untuk pengembangan sektor kemaritiman perlu ditetapkan, untuk menghindari tumpah tindihnya aktivitas di pesisir dan laut, yang semakin menggeliat. Penetapan fokus dan lokasi sektor kemaritiman ini perlu dilakukan terintegrasi. Karenanya, peran dan keterlibatan perguruan tinggi untuk mendukung kebijakan kemaritiman ini dibutuhkan. Mengingat perguruan tinggi dengan fakultas, departemen atau program studi kemaritiman di DIY terbatas. □

*) **Suadi**, Ketua Lab Sosial Ekonomi Perikanan UGM

Pojok KR

Penerbangan umrah kembali dibuka.
-- **Hindari ‘aji mumpung’ menaikkan tarif.**

Pemda DIY sosialisasikan kenaikan UMP.
-- **Sosialisasikan juga agar perusahaan taat.**

Uji coba pedestrian perlu berkesinambungan.
-- **Saatnya memanjakan pejalan kaki.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussyahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulatan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ..Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Semarang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.